

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cina Benteng di Tangerang Pada Masa Orde Baru (1966-1998)” kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan pada rumusan masalah. Ada beberapa hal pokok yang dapat penulis simpulkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, latar belakang kedatangan etnis Tionghoa ke Tangerang belum diketahui pasti tetapi berdasarkan pada kitab sejarah Sunda yang berjudul “Tina Layang Parahyang” (catatan dari Parahyangan) yang menceritakan tentang kedatangan orang Tionghoa sekitar tahun 1407 dengan mendaratnya rombongan Tjen Tjie Lung (Halung) di muara sungai Cisadane yang sekarang diberi nama Teluk Naga. Etnis Cina Peranakan yang ada di Tangerang disebut juga sebagai Cina Benteng. Penyebutan nama Cina Benteng yaitu karena etnis Cina tersebut berdiam di kawasan sekitar Benteng Makassar yang dibangun pada masa Kolonial Belanda.

Kedua, masyarakat Cina Benteng dalam kehidupannya hidup dalam garis kemiskinan. Meskipun mereka hidup serba kekurangan tetapi semangat untuk mencari nafkah tidak pernah hilang. Untuk bisa bertahan hidup mereka bekerja sebagai nelayan, tukang becak, buruh tani dan pedagang kecil. Penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak bisa memenuhi segala kebutuhan,

sehingga ada juga diantara mereka yang menyambi sebagai penyanyi maupun awak dalam kelompok Gambang Kromong.

Kehidupan sosial masyarakat Cina Benteng dengan masyarakat lokal di Tangerang dapat dikatakan harmonis dan saling bergotong-royong satu sama lainnya. Hubungan interaksi yang sudah terjalin sejak kedatangan etnis Tionghoa ini dapat dilihat dari adanya akulturasi kebudayaan dan rasa kegotong-royongan pada saat perayaan upacara-upacara keagamaan etnis Cina seperti perayaan Peh Chun dalam pemandian Perahu Keramat. Akulturasi antara etnis Cina dengan masyarakat lokal terlihat pada kawin campur (Integrasi), bahasa dan kesenian. Meskipun telah terjadi akulturasi kebudayaan, masyarakat Cina Benteng masih tetap mempertahankan adat-istiadat dari leluhurnya. Ini dapat terlihat pada saat memasuki rumah-rumah milik Cina Benteng yang terdapat “meja abu”, dimana meja tersebut digunakan untuk sembahyang kepada nenek moyangnya.

Struktur sosial masyarakat Cina Benteng yaitu bersifat patrilineal, dimana seorang laki-laki derajatnya lebih tinggi dari seorang perempuan. Peranan seorang perempuan etnis Tionghoa hanya sebagai ibu rumah tangga, menuruti semua perkataan suami dan menjaga abu leluhur di dalam rumah. Perempuan etnis Tionghoa tidak dapat mengerjakan pekerjaan di luar rumah, namun perkembangan jaman mengubah paradigma masyarakat Cina Benteng. Sekarang banyak dijumpai perempuan-perempuan etnis Tionghoa yang ikut membantu suaminya berdagang dan bekerja disawah.

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat Cina Benteng yang sangat sulit semakin terpuruk semenjak adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru

yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Salah satu dampak dari kebijakan pemerintah adalah status kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa di Indonesia yang belum jelas, sehingga membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat Cina Benteng tidak dapat mencari pekerjaan yang berpenghasilan besar dan mereka tidak memiliki KTP warga negara Indonesia. Namun untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Cina Benteng menggeluti pekerjaan sebagai tukang becak, nelayan, buruh tani, petani dan pedagang kecil. Meskipun penghasilan mereka dibawah rata-rata bahkan dapat dikatakan hidup dalam garis kemiskinan, tetapi mereka tetap bekerja keras dan pantang menyerah.

Semenjak kekuasaan Orde Baru, banyak terjadi kerusuhan anti Cina di berbagai daerah di Indonesia. Puncak dari kerusuhan-kerusuhan yang memakan korban cukup besar dikalangan etnis Cina adalah peristiwa Mei 1998. Peristiwa tersebut merupakan tragedi yang sangat tragis, dimana selain adanya penjarahan dan kekerasan tetapi juga adanya pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 itu membuat etnis Tionghoa trauma yang berkepanjangan, tidak sedikit dari mereka menjadi gila maupun bunuh diri. Namun dalam kerusuhan Mei 1998 masyarakat Cina Benteng tidak menjadi sasaran amuk massa, ini dikarenakan peristiwa tersebut bukanlah sebuah kerusuhan rasial terhadap kelompok Tionghoa, khususnya kaum perempuan Tionghoa. Peristiwa tersebut justru merupakan peristiwa sosial yang dilandasi akibat kesenjangan ekonomi dan krisis ekonomi yang tidak kunjung tuntas. Setelah kerusuhan Mei 1998 itu terjadi

sampai saat sekarang belum dapat diketahui siapa dalang dibalik perencanaan kerusuhan ini.

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru menuju Reformasi, mulai mengalami perubahan yang berarti bagi etnis Tionghoa. Berbagai peraturan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dihapuskan dan diganti dengan peraturan lainnya seperti: Inpres No 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dibutuhkan lagi seperti yang tertera pada Keppres No.56 Tahun 1996 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Presiden Habibie juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.26/1998 yang mencabut penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Serta Keppres No. 19 tahun 2002 tentang ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional.

Masyarakat Cina Benteng pun mendapatkan dampak dari adanya Reformasi, kehidupan mereka mulai mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Perekonomian masyarakat Cina Benteng mulai meningkat, meskipun masih ada yang menjadi nelayan, petani, buruh dan tukang becak. Pemerintah Tangerang seharusnya mulai memikirkan cara untuk ikut menyejahterakan masyarakat Cina Benteng, yaitu dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Tionghoa yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi dan memperlancar pembuatan KTP untuk status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Tangerang. Namun pada kenyataannya bukan ikut menyejahterakan tetapi pemerintah Tangerang melakukan tindakan yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Cina Benteng yaitu dengan adanya pengusuran besar-besaran pada tanggal 13 April 2010 terhadap masyarakat Cina yang hidup dibantaran sungai Cisadane

dengan alasan akan dibangun konservasi alam. Ternyata keberadaan etnis Cina Benteng di Tangerang masih menjadi masalah besar yang harus diatasi bersama-sama oleh Pemerintah Tangerang maupun masyarakat lokal sendiri.

